

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN 2012-2016



www.freepik.com



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN
LOMBOK BARAT MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>



KATALOG DALAM PENERBITAN

Judul	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat Menurut Pengeluaran 2012-2016
ISBN	: 978-602-6456-03-8
Katalog BPS	: 9302008.5201
No. Publikasi	: 52015.1702
Ukuran Buku	: 21,5 cm X 27,9 cm
Jumlah Halaman	: xiii + 73
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat
Dicetak Oleh	: CV.MAHARANI

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2016 merupakan publikasi rutin yang terbit setiap tahunnya. Dengan memutakhirkan tahun dasar 2000=100 menjadi 2010=100, publikasi ini diharapkan lebih mengakomodir perkembangan dan kebutuhan data. Disusun oleh BPS Kabupaten Lombok Barat, publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Lombok Barat secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012 – 2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Format dan tabel-tabel yang disajikan pada publikasi ini mengalami modifikasi agar dapat lebih memenuhi permintaan pengguna data.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat sehingga memungkinkan terbitnya buku ini.

Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data sangat kami harapkan, sehingga penyempurnaan publikasi dapat kami lakukan di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Gerung, Agustus 2017

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA,

Ir. AGUS ALWI
NIP. 19641231 199103 1 022

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	3
1.2	PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
II	METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	15
2.2	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT).....	17
2.3	PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	19
2.4	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	22
2.5	PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	25
2.6	EKSPOR - IMPOR.....	27
III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA MENURUT PDRB PENGELUARAN Error! Bookmark not defined.	29
3.1	PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	31
3.2	PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	41
3.2.1.	Konsumsi Akhir Rumahtangga.....	41
3.2.2.	Konsumsi Akhir LNPRT.....	45
3.2.3.	Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.2.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	50
3.2.5.	Ekspor Barang dan Jasa	52
3.2.6.	Impor Barang dan Jasa	53

IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN/KOTA	57
4.1 PDRB (NOMINAL)	59
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	60
V PENUTUP	61
VI LAMPIRAN	65
VII DAFTAR PUSTAKA.....	73

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2016	33
Gambar 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016	35
Gambar 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	70
Gambar 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016	37
Gambar 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2016**	38
Gambar 6	laju Pertumbuhan PDRB Adh konstan dan konsumsi Rumah tangga Adh. Konstan 2012-2016	45
Gambar 7	Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	48
Gambar 8	laju Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	49
Gambar 9	laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	50
Gambar 10	laju Pertumbuhan ekspor Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	53
Gambar 11	laju Pertumbuhan Impor Terhadap laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	56

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2016	32
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2016	34
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016	36
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016	38
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016	40
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012—2016	42
Tabel 7	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat, 2012-2016	43
Tabel 8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016	44
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016	46
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	47
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016	51
Tabel 12	Perkembangan Ekspor Kabupaten Lombok Barat 2012—2016	53
Tabel 13	Perkembangan Impor Kabupaten Lombok Barat 2012—2016	55
Tabel 14	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Barat 2012—2016	59
Tabel 15	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2012-2016	60

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2016	67
Lampiran 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2016	68
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	69
Lampiran 4	.Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016	70
Lampiran 5	. IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016	71
Lampiran.6	. Laju IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016	72

BAB 1

Pendahuluan

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun

komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan Cakupan

- a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

-
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB II

Metode Estimasi dan Sumber Data

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan atau beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup:

- a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli

(*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS

- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu,

minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjernak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume nventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}} \times$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah

yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhannya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III

Tinjauan Perekonomian Kab Lombok Barat

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KAB. LOMBOK BARAT MENURUT PDRB PENGELUARAN

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Perkembangan PDRB Pengeluaran di Kabupaten Lombok Barat akan diuraikan pada bagian berikut. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga Berlaku di tahun 2016 meningkat sebesar 10,66 %, yakni dari 11,44 triliun Rupiah tahun 2015 menjadi 12, 67 triliun Rupiah di tahun 2016. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, PDRB Lombok barat senilai 9,26 triliun Rupiah di tahun 2015 menjadi 9,80 triliun Rupiah di tahun 2016.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Lombok Barat periode 2014 - 2016 dapat tetap tumbuh 5%, yakni sebesar 5,70%; 6,39%; dan 5,73%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang selalu tumbuh di atas 8 % setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, perekonomian

Lombok Barat didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2012 - 2016 PDRB Lombok barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 8,32 triliun Rupiah (2012); 8,99 triliun Rupiah (2013); 10,13 triliun Rupiah (2014); 11,44 triliun Rupiah (2015); dan 12,67 triliun Rupiah pada tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Lombok barat pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2016

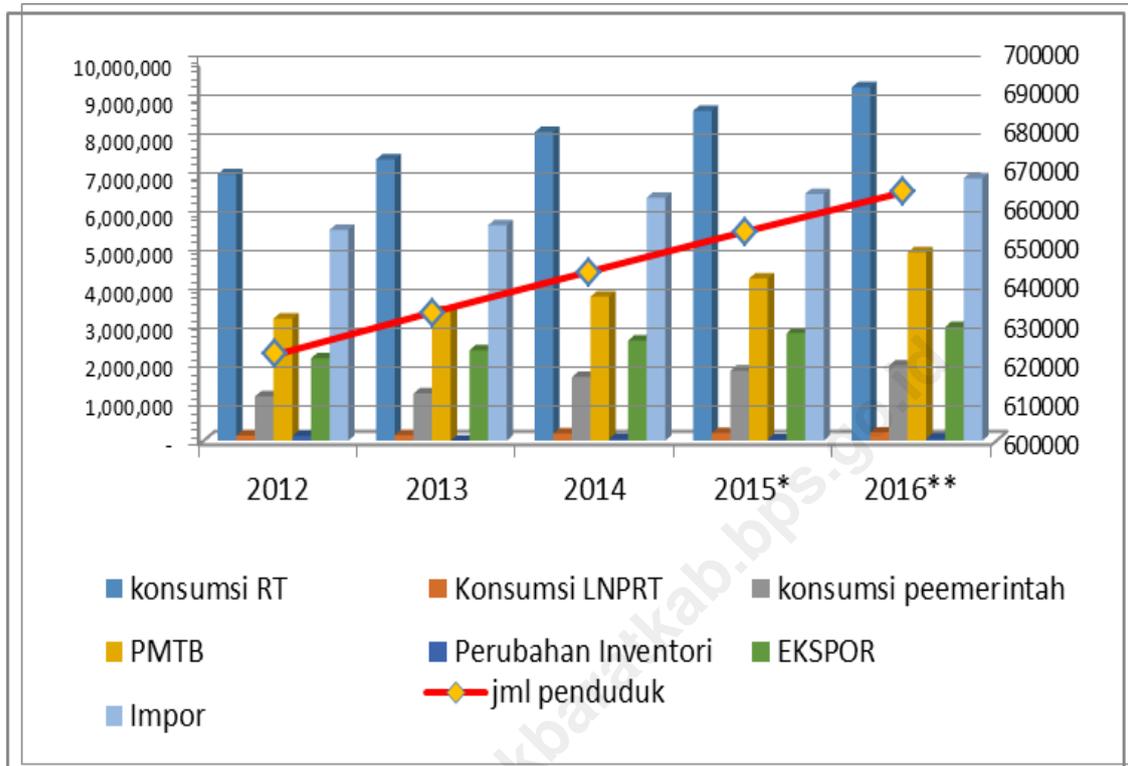
(juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,055,107	7,446,965	8,164,870	8,733,654	9,348,674
2. Konsumsi LNPRT	136,864	153,157	192,241	204,507	222,792
3. Konsumsi Pemerintah	1,175,838	1,251,812	1,686,539	1,855,017	1,992,657
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,236,042	3,439,483	3,816,621	4,294,782	4,982,320
5. Perubahan Inventori	123,622	5,938	50,329	40,133	57,012
6. Ekspor	2,181,555	2,394,016	2,649,456	2,849,850	3,009,730
7. Impor	5,583,076	5,704,120	6,428,788	6,531,040	6,944,914
PDRB	8,325,952	8,987,252	10,131,269	11,446,904	12,668,271

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2016



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Lombok barat pada periode 2012-2016 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2016

(juta Rp)

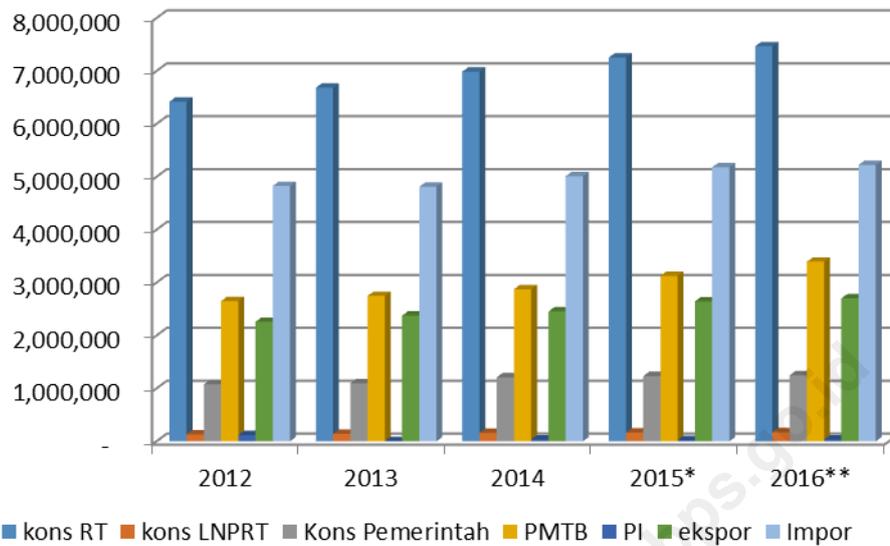
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,419,317	6,683,944	6,987,150	7,254,078	7,467,464
2. Konsumsi LNPRT	131,118	140,262	157,916	163,939	173,360
3. Konsumsi Pemerintah	1,076,773	1,096,210	1,211,436	1,233,236	1,248,487
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,651,663	2,748,722	2,875,036	3,127,527	3,395,177
5. Perubahan Inventori	116,391	4,935	34,339	22,199	33,509
6. Ekspor	2,259,336	2,375,275	2,454,208	2,644,305	2,702,784
7. Impor	4,827,406	4,810,650	5,011,778	5,180,351	5,224,935
PDRB	7,827,193	8,238,698	8,708,308	9,264,933	9,795,845

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

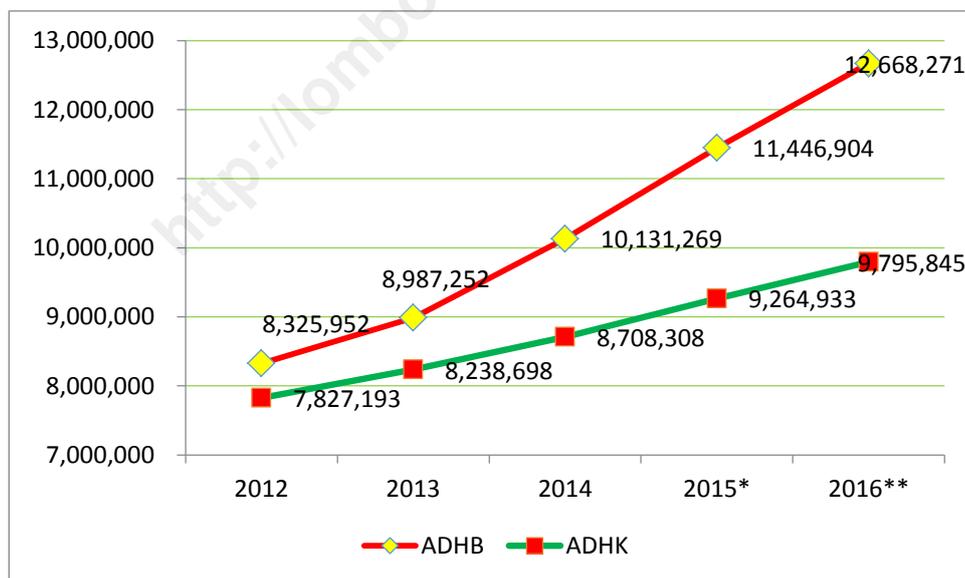
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Lombok Barat meningkat, yakni sebesar 7,8 triliun Rupiah (2012); 8,2 triliun Rupiah (2013); 8,7 triliun Rupiah (2014); 9,3 triliun Rupiah (2015); dan 9,8 triliun Rupiah (2016). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat cenderung melambat, yakni dari 6,39 persen pada tahun 2015 menjadi 5,73 persen pada tahun 2016.

Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016



*Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



*Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga

Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016

Komponen Pengeluaran	persentase(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	84.74	82.86	80.59	76.30	73.80
2. Konsumsi LNPRT	1.64	1.70	1.90	1.79	1.76
3. Konsumsi Pemerintah	14.12	13.93	16.65	16.21	15.73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38.87	38.27	37.67	37.52	39.33
5. Perubahan Inventori	1.48	0.07	0.50	0.35	0.45
6. Ekspor	26.20	26.64	26.15	24.90	23.76
7. Impor	67.06	63.47	63.45	57.06	54.82
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*Angka Sementara

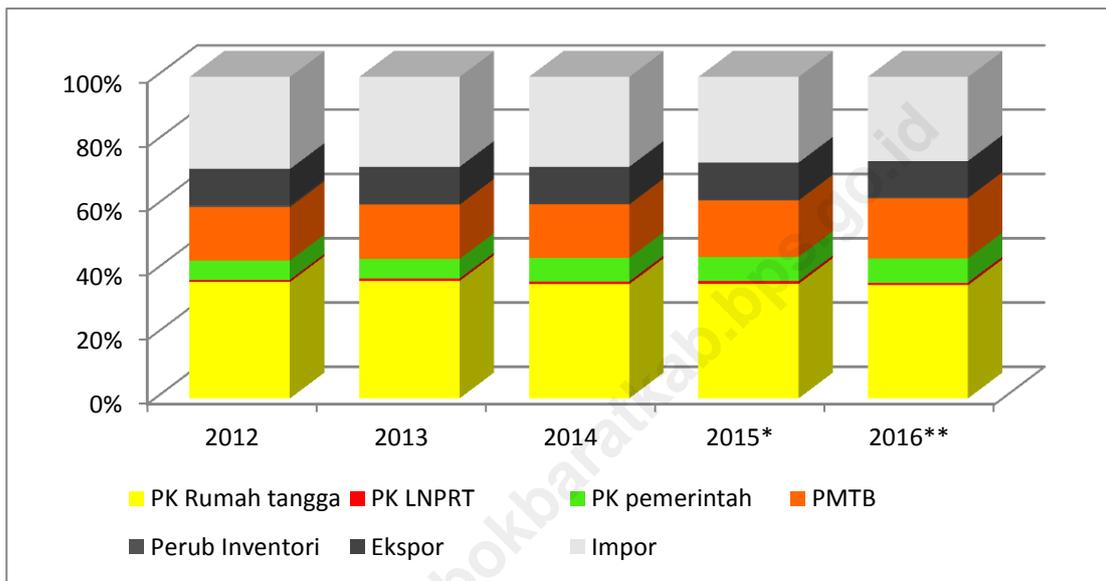
** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2012-2016, PDRB Kabupaten Lombok Barat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 37,52 persen sampai dengan 39,33 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 23,76 hingga 26,64 persen,

namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 54,82 hingga 67,06 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah selama tahun 2012 hingga 2016 berkisar antara 13,93 persen sampai dengan 16,65 persen. Konsumsi lembaga Non profit dan komponen perubahan inventori merupakan komponen dengan kontribusi paling kecil dalam membangun PDRB Kabupaten Lombok Barat.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2012- 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan, yakni sebesar 5,27 persen (2012); 5,26 persen (2013); 5,70 persen (2014); 5,39 persen (2015); dan 5,73 persen (2016). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

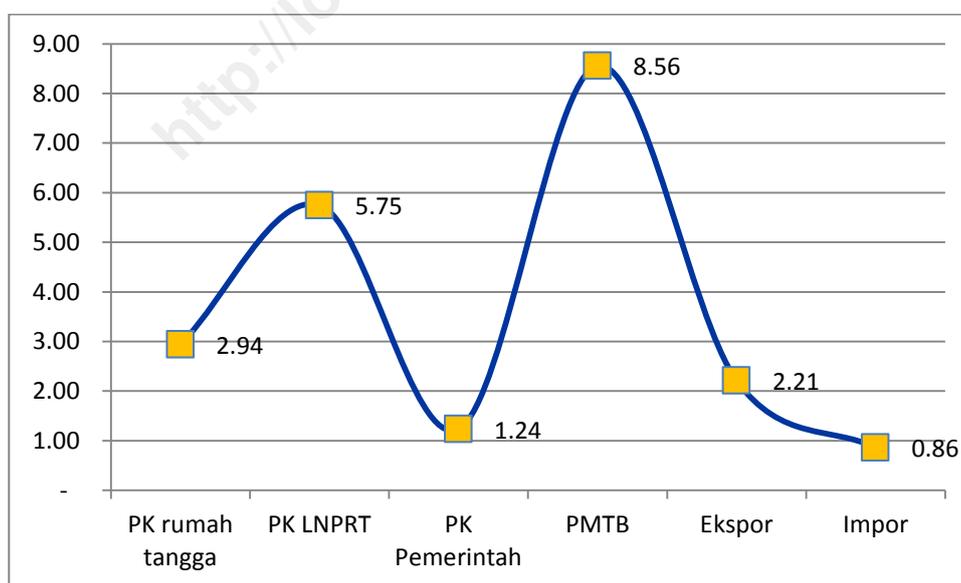
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016

Komponen Pengeluaran	Persentase(%)				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.00	4.12	4.54	3.82	2.94
2. Konsumsi LNPRT	5.31	6.97	12.59	3.81	5.75
3. Konsumsi Pemerintah	4.35	1.81	10.51	1.80	1.24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.11	3.66	4.60	8.78	8.56
5. Ekspor	3.24	5.13	3.32	7.75	2.21
6. Impor	5.94	(0.35)	4.18	3.36	0.86
PDRB	5.27	5.26	5.70	6.39	5.73

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2016**



*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan komponen PMTB pada tahun 2016 merupakan yang terbesar, PMTB Kabupaten Lombok Barat meningkat hingga 8,56 persen. Hal ini menandakan bahwa pembangunan barang modal di Kabupaten Lombok Barat meningkat tajam. Selain PMTB, laju pertumbuhan komponen konsumsi LNPRJ juga meningkat hingga 5,75 persen.

Meskipun kondisi perekonomian global tidak terlalu baik selama 2016, namun kabupaten Lombok Barat mampu menaikkan ekspor barang dan jasa hasil produksinya. Selama tahun 2016 ekspor meningkat sebesar 2,21 persen. Adapun komponen impor pada tahun 2016 masih meningkat 0,86 persen. Kondisi ini perlu diapresiasi karena pemerintah berhasil menekan kenaikan impor Kabupaten Lombok Barat, meskipun secara agregat masih cukup tinggi.

Tipisnya kenaikan nilai impor dapat diartikan sebagai berkurangnya ketergantungan wilayah terhadap produk luar negeri sehingga semestinya saat nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar bagi perdagangan di Lombok Barat. Dengan berkembangnya perekonomian dunia, dan akan dibukanya pasar bebas, memang sudah sepatutnya suatu wilayah dapat mengandalkan produksi lokal.

Sebagai komponen yang paling banyak memberikan andil dalam perekonomian Kabupaten Lombok Barat, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,94 persen pada tahun 2016. Daya beli masyarakat masih meningkat namun sangat terkendali, mengindikasikan kondisi perekonomian kabupaten Lombok Barat masih dalam kondisi aman.

Secara umum karena konsumsi rumah tangga dan PMTB memiliki kontribusi yang paling besar dalam membangun PDRB menurut penggunaan Kabupaten Lombok Barat, maka sedikit perubahan pada komponen ini akan berpengaruh cukup signifikan bagi perekonomian Lombok Barat. Membandingkan laju pertumbuhan kedua komponen ini pada tahun 2012 dengan kondisi pada tahun 2016, dimana untuk komponen pengeluaran rumah tangga laju pertumbuhannya mengalami perlambatan tapi tetap bernilai positif. Adapun komponen PMTB, dibandingkan dengan tahun 2012, laju pertumbuhannya pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Secara umum geliat perekonomian Kabupaten Lombok Barat cenderung baik. Perkembangan dari masing-

masing komponen akan memberikan gambaran lebih lengkap akan nilai tambah Kabupaten Lombok Barat menurut pengeluaran.

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2012 - 2016, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016

persentase (%)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.65	1.38	4.88	3.03	3.98
2. Konsumsi LNPRT	3.41	4.61	11.49	2.47	3.02
3. Konsumsi Pemerintah	3.26	4.57	21.91	8.05	6.11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.66	2.53	6.09	3.44	6.86
5. Perubahan Inventori	4.86	13.28	21.82	23.35	(5.89)
6. Ekspor	(0.30)	4.38	7.11	(0.17)	3.33
7. Impor	9.64	2.52	8.18	(1.72)	5.43
PDRB	4.65	1.38	4.88	3.03	3.98

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2016, perubahan harga PDRB Kabupaten Lombok Barat sebesar 3,98 persen. Dibandingkan dengan inflasi y on y Kota Mataram selama tahun 2016, perubahan harga PDRB Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi. Selama tahun 2016 inflasi Kota

⁶ Indeks perkembangan

mataram hanya sebesar 2,47 persen. Hal ini menandakan kenaikan harga produsen jauh lebih tinggi dari kenaikan harga konsumen, sehingga produsen harus menekan margin keuntungan perusahaan.

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2012 - 2016.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Lombok Barat ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Lombok Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012 - 2016 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas dasar harga berlaku (<i>miliar rp</i>)	7,055.11	7,446.97	8,164.87	8,733.65	9,348.67
Atas dasar harga konstan 2010 (<i>miliar rp</i>)	1.599	1.776	2.034	2,093	2,160
Proporsi terhadap pdrb (% atas dasar harga berlaku)	84.74	82.86	80.59	76.30	73.80
Rata-rata konsumsi per-rumah tangga/tahun (<i>jutarp</i>)					
Atas dasar harga berlaku					
Atas dasar harga konstan 2010					
Rata-rata konsumsi per-Kapita/tahun (<i>juta rp</i>)					
Atas dasar harga berlaku	11.31	11.74	12.67	13.34	14.06
Atas dasar harga konstan 2010	10.29	10.54	10.84	11.08	11.23
Pertumbuhan ⁷					
Total konsumsi rt	6.00	4.12	4.54	3.82	2.94
Per-rt					
Perkapita	4.17	2.39	2.84	2.19	1.36
Jumlah RT (<i>unit</i>)					
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	623602	634126	644586	654892	665132

Selama periode 2012 - 2016 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 84,70 persen (2012); 82,86 persen (2013); 80,59 persen (2014); 76,30 persen (2015); dan 73,80 persen (2016). Meskipun Konsumsi rumah tangga masih mendominasi pada PDRB pengeluaran ini, namun persentase peranan dominannya semakin berkurang dari tahun ke tahun. hal ini dikarenakan komponen

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

yang lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mampu merangsek untuk lebih berperan dalam perekonomian.

Meskipun peranan konsumsi rumah tangga menurun, tapi pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan. Pada tahun 2016 peningkatan komponen konsumsi rumah tangga hanya sebesar 2,94 persen, sedangkan pada tahun 2016 mampu tumbuh hingga 6,00 persen.

Pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga per-kapita menunjukkan peningkatan, walaupun melambat selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. pada tahun 2012 pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga perkapita meningkat hingga 4,17 persen, sedangkan tahun 2016 hanya mampu meningkat sebesar 1,36 persen. Hal ini bukan berarti daya beli masyarakat mengalami penurunan, daya beli masyarakat tetap meningkat namun tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan rata-rata konsumsi rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Lombok Barat, 2012-2016

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51.59	49.34	49.44	49.03	49.52
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.89	3.80	3.70	3.77	3.86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	21.82	23.13	23.38	24.10	24.06
d. Kesehatan & Pendidikan	4.51	4.63	4.47	4.59	4.71
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14.32	15.01	15.08	14.61	13.79
f. Hotel & Restoran	2.02	2.14	2.10	2.09	2.17
g. Lainnya	1.86	1.95	1.83	1.81	1.90
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2012 hingga tahun 2016, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Lombok Barat, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 51,59 persen (2012) ; 49,34 persen (2013) ; 49,44 persen (2014) ; 49,03 persen (2015) ; dan 49,52 persen (2016).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, dan jasa kesehatan

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016

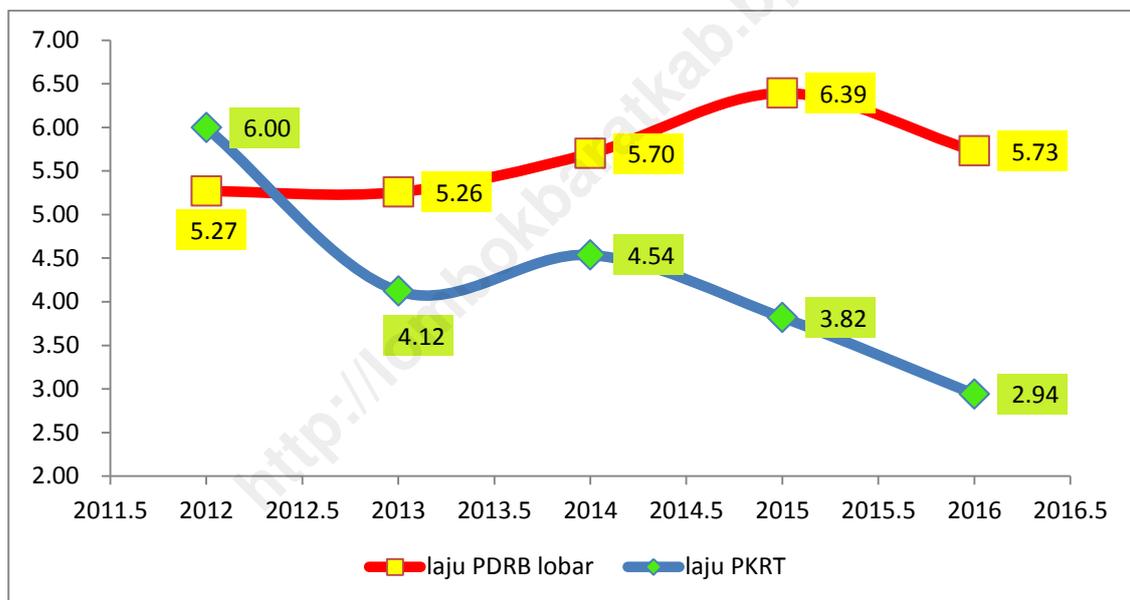
Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.26	(1.59)	5.76	2.56	5.38
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.87	0.56	2.73	6.06	6.03
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.59	4.35	4.32	5.18	3.55
d. Kesehatan & Pendidikan	5.69	3.97	2.30	5.93	5.49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.91	6.08	4.84	(0.33)	(2.01)
f. Hotel & Restoran	13.75	4.51	2.67	2.80	6.74
g. Lainnya	10.86	4.20	2.90	3.01	9.22
Konsumsi Rumah Tangga	4.65	1.38	4.88	3.03	3.98

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,65 persen. Tahun 2016, peningkatan harga konsumsi akhir rumah tangga sebesar 3,98 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok lainnya, yakni sebesar 9,22 persen. Kelompok makanan, minuman, dan rokok mengalami kenaikan harga sebesar 5,38 persen. Kelompok transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan budaya mengalami deflasi sebesar 2,01 persen. Deflasi dikarenakan efek dari penurunan harga BBM yang terjadi pada tahun 2016, selain itu perang tarif komunikasi juga berpengaruh pada penurunan harga provider telekomunikasi.

Gambar 6. laju Pertumbuhan PDRB Adh konstan dan konsumsi Rumah tangga Adh. Konstan 2012-2016



*angka sementara

**angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra

pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Barat 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. Atas dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	136,86	153,16	192,24	204,51	222,79
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	131,12	140,26	157,9	163,94	173,36
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1.64	1.70	1.90	1.79	1.76
Pertumbuhan (% ADHK 2010)	5.31	6.97	12.59	3.81	5.75

*angka sementara

**angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT naik dari Rp. 136,86 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp. 222,79 miliar pada tahun 2016. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT naik drastis pada tahun 2014. Hal ini wajar terjadi karena ada peristiwa pemilihan DPR, DPRD, dan presiden. Dibandingkan tahun 2015, pengeluaran konsumsi LNPRT tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 5,75 persen. Hal ini mengindikasikan geliat organisasi dan lembaga non profit mulai meningkat walaupun belum terlalu signifikan untuk menyambut pemilihan umum bupati yang akan diadakan pada 2018.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang

dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	1,175.84	1,251.81	1,686.54	1,855.02	1,992.66
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1,076.77	1,096.21	1,211.44	1,233.24	1,248.49
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	14.12	13.93	16.65	16.21	15.73
Pertumbuhan ⁸ konsumsi pemerintah (% Atas dasar Harga Konstan)	4.35	1.81	10.51	1.80	1.24

*angka sementara

**angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 1,18 triliun, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar Rp. 1,25 triliun rupiah (2013), 1,69 triliun rupiah (2014), 1,86 triliun rupiah (2015), dan 1,99 triliun rupiah (2016). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga

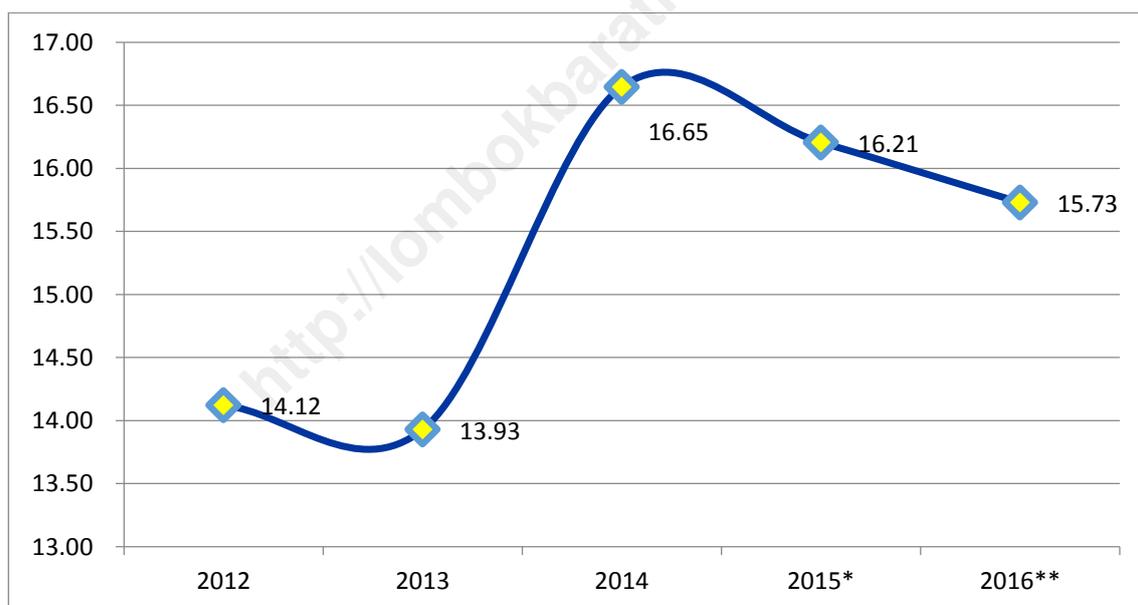
⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000)

mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari 14,12 persen (tahun 2012) hingga mencapai 15,73 persen (tahun 2016). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,93 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 yakni sebesar 16,65 persen.

Kontribusi konsumsi pemerintah Adh Berlaku juga selalu mengalami trend yang berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016. keadaan ini terjadi diduga disebabkan oleh peningkatan kontribusi komponen lain yang meningkat atau menurun jauh lebih banyak dari konsumsi pemerintah.

Gambar 7. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



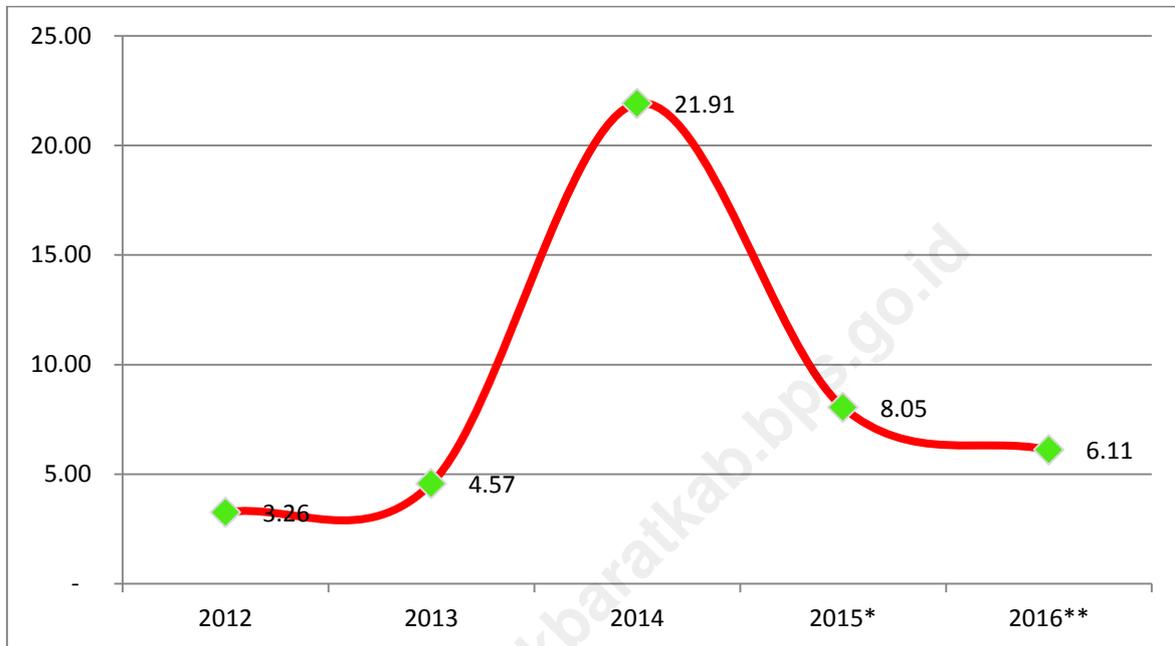
*angka sementara

**angka sangat sementara

Laju indeks implisit komponen Konsumsi Pemerintah juga sangat fluktuatif dimana pada tahun 2012 sebesar 3,26 persen dan meningkat menjadi 4,57 persen pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat pesat menjadi 21,91 persen dan kembali turun pada tahun 2015 menjadi 8,05 persen. Uniknya, pada tahun 2016 laju IHI meningkat hanya sebesar 6,11 persen. Pada tahun 2014 laju implisit mengalami peningkatan yang signifikan karena beberapa kementerian dan lembaga pemerintah

mendapatkan renumerasi sehingga meningkatkan konsumsi pemerintah secara signifikan.

Gambar 8. laju Pertumbuhan Implisit Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



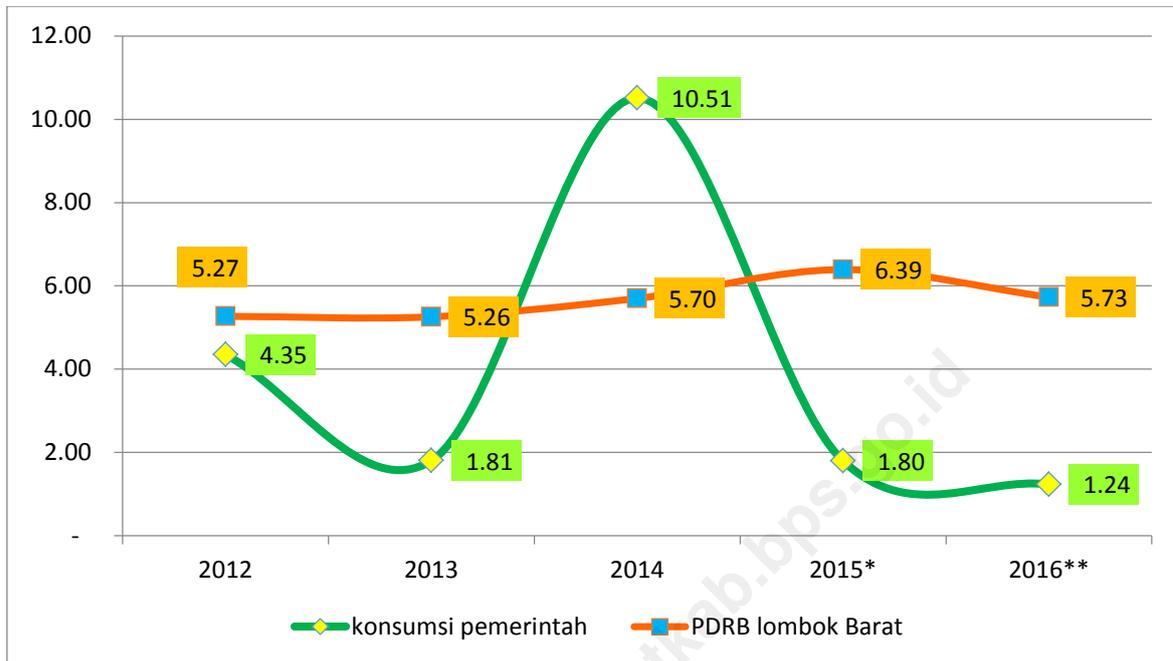
*angka sementara

**angka sangat sementara

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah memiliki pola yang senada dengan konsumsi lembaga non profit, namun peningkatan laju konsumsi pemerintah per tahunnya lebih lambat dibandingkan dengan laju konsumsi non profit.

Pada periode tahun 2012 hingga 2016, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak searah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat. Peranan konsumsi pemerintah tidaklah terlalu tinggi sehingga tidak dapat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok barat. Hal ini terlihat pada tahun 2014 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 21,91 persen, uniknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada tahun itu hanya sebesar 5,70 persen.

Gambar 9. laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



*angka sementara

**angka sangat sementara

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB merupakan penjumlahan neto dari pengadaan, pembuatan maupun pembelian barang modal (*fixed aset*). Modalnya sendiri bisa ditanamkan oleh pihak asing maupun swasta dalam bentuk investasi. Sehingga besarnya PMTB dapat menjadi salah satu indikator geliat investasi di suatu wilayah. Untuk dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Lombok Barat, campur tangan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi masih sangat diperlukan. Suasana politik dan

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

sosial yang kondusif serta potensi yang dimiliki oleh Lombok Barat dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	3,236,042	3,439,483	3,816,621	4,294,782	4,982,320
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	2,651,663	2,748,722	2,875,036	3,127,527	3,395,177
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	38.87	38.27	37.67	37.52	39.33
Pertumbuhan ¹⁰ PMTB (% Atas dasar Harga Konstan)	7.11	3.66	4.60	8.78	8.56
Struktur PMTB ¹¹					
a. Bangunan (miliar Rp.)	2,770,812	2,902,573	3,202,682	3,582,478	4,196,463
(%)	85.62	84.39	83.91	83.41	84.23
b. Non Bangunan (miliar Rp.)	465,230	536,910	613,939	712,303	785,857
(%)	16.79	18.50	19.17	19.88	18.73
c. Total PMTB (%)	100	100	100	100	100

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sebagai cerminan dari investasi yang telah berjalan di Lombok Barat, PMTB Adh berlaku Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 hanya mencapai 3,2 triliun rupiah. Pada tahun 2016 nilai PDRB adh berlaku tahun 2016 meningkat hingga 4,98 triliun rupiah. Kenaikan PMTB selama kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 54 persen. Sehingga diperoleh gambaran bahwa nilai investasi di kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup menggembirakan dan menunjukkan iklim yang sehat.

Dalam pembentukan PDRB pengeluaran Lombok Barat, kontribusi PMTB ternyata cukup besar yaitu lebih dari 30 persen baik Adh berlaku maupun Adh konstan. Kontribusi PMTB ini juga bahkan lebih besar dari pada kontribusi komponen Konsumsi

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Lembaga Non profit dan bahkan Konsumsi Pemerintah. Geliat PMTB di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dengan jelas pada pembangunan sarana dan prasarana fisik di kabupaten Lombok Barat. Kontribusi PMTB Adh berlaku cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2012, adapun kontribusi PMTB Adh Konstan 2010 relatif lebih stabil dan hanya sedikit mengalami pergerakan.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. peranan PMTB bangunan terhadap PMTB di Kabupaten Lombok barat selama kurun waktu lima tahun terakhir berada diatas 80 persen. Hal ini menandakan bahwa pembangunan modal tetap di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berupa bangunan.

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Lombok barat lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2015 dan 2016 tersebut laju pertumbuhan PMTB berada diatas delapan persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan modal tetap bruto di Kabupaten Lombok Barat meningkat pesat. Hal ini terlihat dengan banyaknya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat selama dua tahun terakhir ini.

3.2.5. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2012-2016 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2,26 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 2,37 triliun rupiah pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014-2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2,45 triliun rupiah; 2,64 triliun rupiah; dan 2,70 triliun rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai

“riil” masing-masing tahun sebesar 2,18 triliun rupiah (2012); 2,39 triliun rupiah (2013); 2,65 triliun rupiah (2014); 2,85 triliun rupiah (2015); dan 3,01 triliun rupiah (2016). Sementara itu, pada periode 2012 s.d 2016, proporsi dalam PDRB justru cenderung menurun dari 26,20 persen pada tahun 2012 menjadi 23,76 persen di tahun 2016.

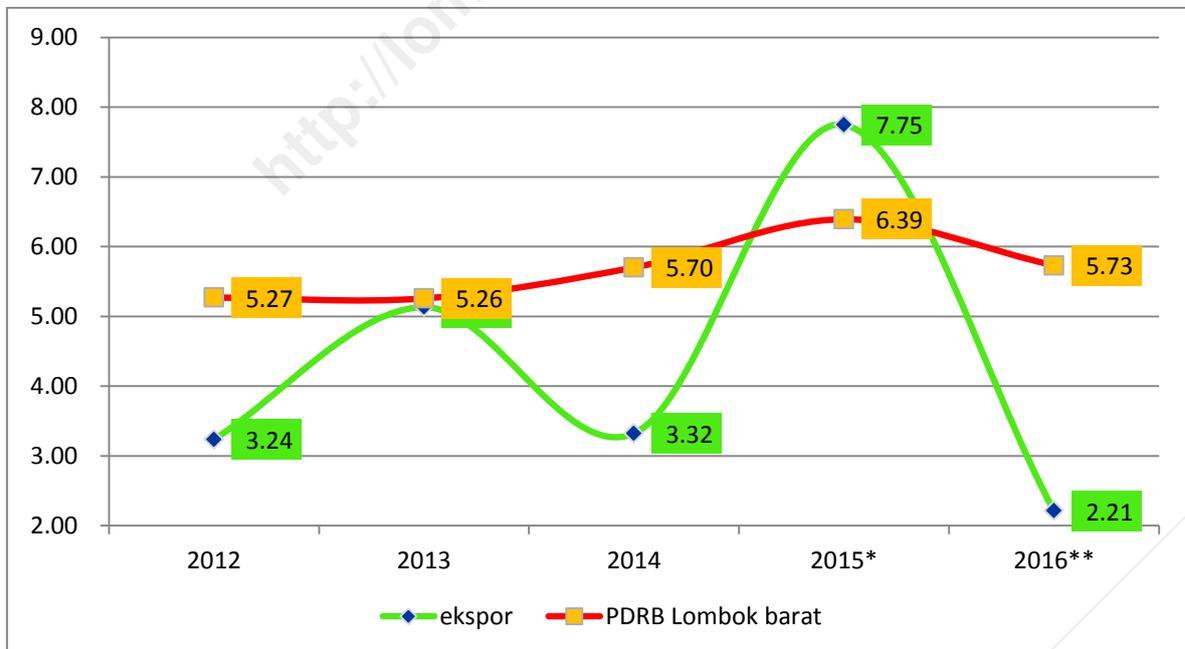
Tabel 12. Perkembangan Ekspor Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	2,259,336	2,375,275	2,454,208	2,644,305	2,702,784
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2,181,555	2,394,016	2,649,456	2,849,850	3,009,730
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	26.20	26.64	26.15	24.90	23.76
Pertumbuhan ¹²	3.24	5.13	3.32	7.75	2.21

*angka sementara

**angka sangat sementara

Gambar 10. laju Pertumbuhan ekspor Terhadap laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



*angka sementara

**angka sangat sementara

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Pertumbuhan ekspor Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015 cenderung meningkat. Pertumbuhan ekspor Kabupaten Lombok Barat sekitar 2,21 persen hingga 7,75 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat terkecil selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni sebesar 2,21 persen.

3.2.6. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Lombok Barat. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Lombok Barat di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Lombok Barat terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 13. Perkembangan Impor Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	5,583,076	5,704,120	6,428,788	6,531,040	6,944,914
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4,827,406	4,810,650	5,011,778	5,180,351	5,224,935
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	67.06	63.47	63.45	57.06	54.82
Pertumbuhan ¹³ konsumsi pemerintah (% Atas dasar Harga Konstan)	5.94	(0.35)	4.18	3.36	0.86

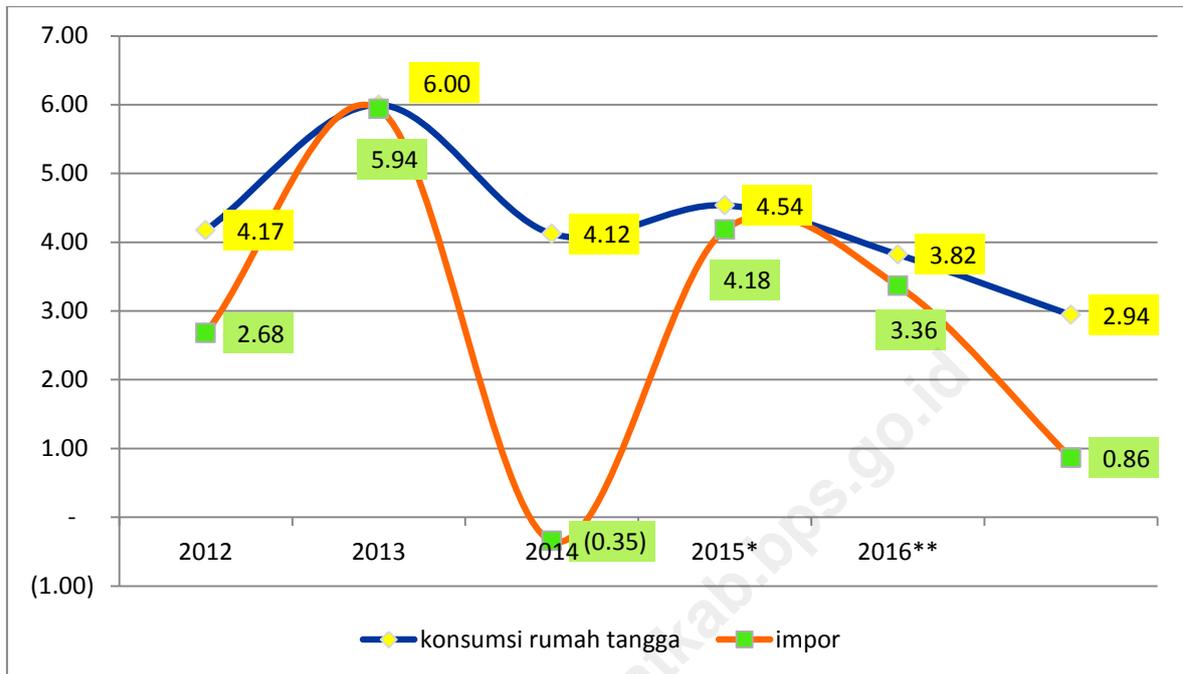
*angka sementara

**angka sangat sementara

Data pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Lombok Barat meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2012 s.d 2016. Pada tahun 2012 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 5,60 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 5,70 triliun rupiah, 6,43 triliun rupiah pada tahun 2014, 6,53 triliun rupiah pada tahun 2015, dan menjadi 6,94 triliun rupiah pada tahun 2016. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2012 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 67,06 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 63,47 persen dan 63,45 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015-2016 proporsi impor barang dan jasa sebesar 57,06 persen dan 54,82 persen.

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan / ATAS DASAR HARGAK 2000)

Gambar 11. laju Pertumbuhan Impor Terhadap laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat 2012-2016



*angka sementara

**angka sangat sementara

laju Pertumbuhan Impor di Kabupaten Lombok Barat searah dengan laju pertumbuhan Konsumsi rumah tangga. pergerakan selama lima tahun terakhir ini beriringan meskipun nilai penurunan atau kenaikan laju pertumbuhan tidak sama. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan impor. sama arahnya kedua komponen ini mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga dipenuhi dari aktivitas impor di wilayah kabupaten Lombok Barat.

BAB IV

Perkembangan Agregat **Kab Lombok Barat**

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KAB. LOMBOK BARAT

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Lombok Barat di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Lombok Barat 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2104	2015*	2106**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	8,325,952	8,987,252	10,131,269	11,446,904	12,668,271
- ADHK 2010	7,827,193	8,238,698	8,708,308	9,264,933	9,795,845
PDRB perkapita (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	13,351.39	14,172.66	15,717.48	17,479.07	19,046.25
- ADHK 2010	12,551.58	12,992.21	13,509.92	14,147.27	14,727.67
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3.46	3.51	3.98	4.72	4.10
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	623602	634126	644586	654892	665132
Pertumbuhan	1.75	1.69	1.65	1.60	1.56

*angka sementara

**angka sangat sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2012-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)						
a. Rumah tangga	7,055,107	7,446,965	8,164,870	8,733,654	9,348,674	7,055,107
b. LNPRT	136,864	153,157	192,241	204,507	222,792	136,864
c. Pemerintah	1,175,838	1,251,812	1,686,539	1,855,017	1,992,657	1,175,838
Jumlah	8,367,809	8,851,935	10,043,650	10,793,178	11,564,123	8,367,809
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	8,325,952	8,987,252	10,131,269	11,446,904	12,668,271	8,325,952

*angka sementara

**angka sangat sementara



BAB V

Penutup

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 s.d 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Lombok Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012s.d 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel

yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Lombok Barat terhadap ekonomi luar daerah.

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>



Lampiran

<http://lombokbarat.go.id/bps.go.id>

<http://lombokbaratkab.bps.go.id>

Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,055,107	7,446,965	8,164,870	8,733,654	9,348,674
Makanan, Minuman, dan Rokok	3,639,900	3,674,301	4,036,701	4,281,783	4,629,093
Pakaian dan Alas Kaki	274,411	282,620	301,904	329,028	360,564
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,539,180	1,722,301	1,908,543	2,104,921	2,249,411
Kesehatan dan Pendidikan	318,163	344,808	365,193	401,234	440,198
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,010,111	1,118,139	1,231,423	1,276,020	1,289,393
Hotel dan Restoran	142,458	159,482	171,346	182,554	202,710
Lainnya	130,884	145,314	149,760	158,115	177,303
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,864	153,157	192,241	204,507	222,792
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,175,838	1,251,812	1,686,539	1,855,017	1,992,657
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,236,042	3,439,483	3,816,621	4,294,782	4,982,320
Bangunan	2,770,812	2,902,573	3,202,682	3,582,478	4,196,463
Non-Bangunan	465,230	536,910	613,939	712,303	785,857
Perubahan Inventori	123,622	5,938	50,329	40,133	57,012
Ekspor	2,181,555	2,394,016	2,649,456	2,849,850	3,009,730
Impor	5,583,076	5,704,120	6,428,788	6,531,040	6,944,914
PDRBe	8,325,952	8,987,252	10,131,269	11,446,904	12,668,271

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,419,317	6,683,944	6,987,150	7,254,078	7,467,464
Makanan, Minuman, dan Rokok	3,215,002	3,297,676	3,425,606	3,542,778	3,634,732
Pakaian dan Alas Kaki	252,921	259,036	269,368	276,792	286,069
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,452,645	1,557,676	1,654,557	1,734,978	1,790,454
Kesehatan dan Pendidikan	288,012	300,201	310,789	322,352	335,266
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	971,081	1,013,290	1,064,433	1,106,654	1,141,245
Hotel dan Restoran	123,327	132,112	138,249	143,281	149,057
Lainnya	116,329	123,954	124,150	127,244	130,640
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	131,118	140,262	157,916	163,939	173,360
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,076,773	1,096,210	1,211,436	1,233,236	1,248,487
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,651,663	2,748,722	2,875,036	3,127,527	3,395,177
Bangunan	2,217,251	2,313,702	2,427,473	2,644,333	2,899,360
Non-Bangunan	434,412	435,020	447,563	483,194	495,816
Perubahan Inventori	116,391	4,935	34,339	22,199	33,509
Ekspor	2,259,336	2,375,275	2,454,208	2,644,305	2,702,784
Impor	4,827,406	4,810,650	5,011,778	5,180,351	5,224,935
PDRBe	7,827,193	8,238,698	8,708,308	9,264,933	9,795,845

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	84.74	82.86	80.59	76.30	73.80
Makanan, Minuman, dan Rokok	43.72	40.88	39.84	37.41	36.54
Pakaian dan Alas Kaki	3.30	3.14	2.98	2.87	2.85
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	18.49	19.16	18.84	18.39	17.76
Kesehatan dan Pendidikan	3.82	3.84	3.60	3.51	3.47
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12.13	12.44	12.15	11.15	10.18
Hotel dan Restoran	1.71	1.77	1.69	1.59	1.60
Lainnya	1.57	1.62	1.48	1.38	1.40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.64	1.70	1.90	1.79	1.76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.12	13.93	16.65	16.21	15.73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38.87	38.27	37.67	37.52	39.33
Bangunan	33.28	32.30	31.61	31.30	33.13
Non-Bangunan	5.59	5.97	6.06	6.22	6.20
Perubahan Inventori	1.48	0.07	0.50	0.35	0.45
Ekspor	26.20	26.64	26.15	24.90	23.76
Impor	67.06	63.47	63.45	57.06	54.82
PDRBe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-100 Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.00	4.12	4.54	3.82	2.94
Makanan, Minuman, dan Rokok	4.45	2.57	3.88	3.42	2.60
Pakaian dan Alas Kaki	8.33	2.42	3.99	2.76	3.35
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8.71	7.23	6.22	4.86	3.20
Kesehatan dan Pendidikan	8.72	4.23	3.53	3.72	4.01
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.81	4.35	5.05	3.97	3.13
Hotel dan Restoran	5.97	7.12	4.65	3.64	4.03
Lainnya	6.35	6.56	0.16	2.49	2.67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.31	6.97	12.59	3.81	5.75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.35	1.81	10.51	1.80	1.24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.11	3.66	4.60	8.78	8.56
Bangunan	4.49	4.35	4.92	8.93	9.64
Non-Bangunan	22.83	0.14	2.88	7.96	2.61
Ekspor	3.24	5.13	3.32	7.75	2.21
Impor	5.94	(0.35)	4.18	3.36	0.86
PDRBe	5.27	5.26	5.70	6.39	5.73

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5. IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	109.90	111.42	116.86	120.40	125.19
Makanan, Minuman, dan Rokok	113.22	111.42	117.84	120.86	127.36
Pakaian dan Alas Kaki	108.50	109.10	112.08	118.87	126.04
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	105.96	110.57	115.35	121.32	125.63
Kesehatan dan Pendidikan	110.47	114.86	117.51	124.47	131.30
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104.02	110.35	115.69	115.30	112.98
Hotel dan Restoran	115.51	120.72	123.94	127.41	135.99
Lainnya	112.51	117.23	120.63	124.26	135.72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	104.38	109.19	121.74	124.75	128.51
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	109.20	114.19	139.22	150.42	159.61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	122.04	125.13	132.75	137.32	146.75
Bangunan	124.97	125.45	131.93	135.48	144.74
Non-Bangunan	107.09	123.42	137.17	147.42	158.50
Ekspor	96.56	100.79	107.96	107.77	111.36
Impor	115.65	118.57	128.27	126.07	132.92
PDRBe	106.37	109.09	116.34	123.55	129.32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 6. Laju IHI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.65	1.38	4.88	3.03	3.98
Makanan, Minuman, dan Rokok	6.26	(1.59)	5.76	2.56	5.38
Pakaian dan Alas Kaki	3.87	0.56	2.73	6.06	6.03
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.59	4.35	4.32	5.18	3.55
Kesehatan dan Pendidikan	5.69	3.97	2.30	5.93	5.49
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.91	6.08	4.84	(0.33)	(2.01)
Hotel dan Restoran	13.75	4.51	2.67	2.80	6.74
Lainnya	10.86	4.20	2.90	3.01	9.22
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.41	4.61	11.49	2.47	3.02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.26	4.57	21.91	8.05	6.11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.66	2.53	6.09	3.44	6.86
Bangunan	15.89	0.39	5.17	2.69	6.84
Non-Bangunan	2.33	15.25	11.14	7.47	7.52
Ekspor	(0.30)	4.38	7.11	(0.17)	3.33
Impor	9.64	2.52	8.18	(1.72)	5.43
PDRBe	3.19	2.55	6.65	6.20	4.67

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

I



**Daftar
Pustaka**

<http://www.pustaka.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang- Gerung- lombok barat
telp/fax : (0370) 681550 E-Mail : bps5201@bps.go.id
Website : lombokbaratkab.bps.go.id

